

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Analisis Penerapan *Smart Governance* Dalam Mewujudkan *Smart City* Di Kota Semarang

Clarinta Dwi Damayanthi ^a dan Alih Aji Nugroho ^b

^{a, b} Politeknik STIA LAN Jakarta

^{a, b} clarintadwi02@gmail.com

Abstrak

Penerapan konsep *Smart City* di Kota Semarang telah menjadi fokus sejak tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja *Smart Governance* yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan penelitian, kerangka teori yang digunakan mencakup konsep *Smart City*, *Smart Governance*, dan indikator *Smart Governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal, artikel, website resmi, dan data sekunder lainnya. Data ini kemudian dievaluasi dengan mengacu pada indikator *Smart Governance*, yang mencakup Enabling supply & demand side policy, Transparency & open data, serta ICT & E-Gov. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil dalam menerapkan kinerja *Smart Governance* mencerminkan komitmen aspek-aspek penting *Smart City*, seperti kebijakan yang mendukung, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Meskipun demikian, untuk memastikan berkelanjutan dan peningkatan, evaluasi berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Kota Semarang telah bergerak maju dalam mewujudkan visi *Smart City*. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi pemerintah daerah lain yang juga tengah mengembangkan konsep *Smart City*, sambil menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang berbasis teknologi.

Kata Kunci: Implementasi; *Smart City*; *Smart Governance*.

Analysis of the Implementation of Smart Governance in Realizing Smart City in the City of Semarang

Abstract

The implementation of the *Smart City* concept in Semarang has been a focus since 2013. This research aims to evaluate the performance of *Smart Governance* that the Semarang City Government has implemented in achieving set targets. To achieve this goal, the theoretical framework employed includes the concepts of *Smart City*, *Smart Governance*, and *Smart Governance* indicators. A qualitative descriptive research method was used, involving the analysis of secondary data from various sources, including journals, articles, official websites, and other secondary data. These data were evaluated using the *Smart Governance* indicators defined by Boyd Cohen (2012), comprising Enabling supply & demand side policy, Transparency & open data, and ICT & E-Gov. The research results

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

indicate that Smart Governance in Semarang has been successfully implemented. Their performance reflects a commitment to critical aspects of the Smart City, such as supportive policies, transparency, and the utilization of information technology for public services. Nevertheless, to ensure sustainability and improvement, continuous evaluation and active community participation are crucial. This research provides an overview of Semarang's significant progress in realizing the Smart City vision. The findings offer valuable guidance for other local governments embarking on Smart City development, emphasizing the vital role of active community involvement in technology-based sustainable development.

Keywords: Implementation; Smart City; Smart Governance

A. PENDAHULUAN

Perkotaan sangat penting bagi dinamika perkembangan suatu wilayah dan perekonomian nasional (Kozłowski and Suwar 2021). Maraknya pembangunan di perkotaan telah menjadi magnet bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Pemerataan pembangunan dari pinggiran dan perkotaan menjadi prioritas (Nugroho, 2018). Namun, urbanisasi ini menimbulkan berbagai masalah ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan di daerah perkotaan akibat kurangnya pengendalian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275,77 juta orang dengan 57,9 % penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, sementara 42,1% tinggal di pedesaan. Bahkan, pada tahun 2035 tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 66,6 %.

Disisi lain, perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang pada akhirnya mempengaruhi kebutuhan dan harapan mereka. Narasi kebijakan tersebut yang dibangun di era modern (Nugroho dan Azmi, 2021). Kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial memainkan peran sentral dalam mengubah lanskap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat modern menginginkan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang aman serta nyaman, area publik yang memadai, serta kemudahan dalam mendapatkan atau mengurus segala bentuk pelayanan publik (Hasibuan and Sulaiman 2019).

Konsep *smart city* merupakan sebuah ide besar yang dapat menghadapi tantangan tersebut. Smart city dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Wahyudi dkk, 2022). Konsep ini dirancang untuk memajukan kota dalam suatu negara dengan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif (Hasibuan and Sulaiman 2019). Di Indonesia, konsep ini sudah mulai dikembangkan dan diterapkan di beberapa kota sejak tahun 2015.

Salah satu kota yang menerapkan konsep *smart city* adalah Kota Semarang. Penerapan konsep *smart city* sudah dilakukan sejak tahun 2013 yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau MoU antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Telkom tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan program *digital government service* (Wibowo 2022) hingga sekarang. Namun, dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Kota Semarang untuk mewujudkan e-government belum berjalan efektif (Kristanto, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas terkait penerapan *smart governance* di Kota Semarang. Pokok permasalahan pada penelitian adalah bagaimana penerapan *smart governance* di Kota Semarang sebagai salah satu program prioritas dalam mewujudkan konsep *smart city* di Kota Semarang. Sehingga dapat diketahui apakah penerapan *smart governance* yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang sudah berjalan dengan baik atau belum dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

B. PEMBAHASAN

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang telah memulai inisiatif *smart governance* sebelum adanya Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Inisiatif tersebut mencakup peluncuran 148 sistem dan aplikasi SPBE serta penandatanganan kesepakatan *Smart*

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

E-Government oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang, yang kemudian diikuti dengan integrasi sistem lintas OPD. Selanjutnya, penguatan inisiatif *smart governance* dilakukan pada tahun 2017 melalui pengembangan dengan meluncurkan *website* <https://smartcity.semarangkota.go.id/> dan beberapa aplikasi interaktif dan informatif yang bertujuan menguatkan keterbukaan informasi publik.



Gambar 3.
Tampilan *Website Semarang Smart City*

Untuk dapat mengetahui apakah penerapan *smart government* yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang sudah berjalan dengan baik atau belum, maka diperlukan suatu penilaian atau evaluasi. Penelitian ini akan mengevaluasi menggunakan komponen penting untuk mewujudkan *smart governance* menurut Boyd Cohen (2012) yang terdiri dari *Enabling supply & demand side policy*, *Transparency & open data*, dan *ICT & E-Gov*. Berikut adalah hasil analisis dari tiap-tiap komponen *smart governance* di Kota Semarang.

1. *Enabling supply & demand side policy*

Dalam mewujudkan konsep *smart city*, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan yang mengatur pengembangan *smart city* di Kota Semarang. Kebijakan yang sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan *smart city*.

Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas (Masterplan Semarang

Smart City) sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Semarang *Smart City*. Hal ini menunjukkan adanya kerangka kerja yang terstruktur dan terencana untuk mengarahkan pengembangan *smart city* di Kota Semarang yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif. Dengan adanya masterplan ini, pemerintah Kota Semarang juga dapat memiliki panduan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan visi *smart city* mereka yaitu "Menjadikan Kota Lebih Baik Dan Hebat".

Selain adanya kebijakan yang mengatur pengembangan *smart city*, Pemerintah Kota Semarang juga berkolaborasi dengan sektor swasta dalam menyediakan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan, serta menjadi mitra dalam pengembangan dan implementasi solusi cerdas. Hal ini terlihat dari Masterplan Semarang *Smart City* yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang dan PT Telkom bekerja sama dalam mewujudkan program *digital government service* dengan memasang *free wifi ide* (2.300 titik) disekeliling tempat seperti sekolah, perkantoran, dan area publik pada tahun 2013. Pemerintah Kota Semarang juga mengusung inovasi pelayanan publik dengan berkolaborasi dengan pihak swasta yakni Go-Jek sejak tahun 2018 yang menghasilkan beberapa inisiatif konkret, seperti penggunaan pembayaran non-tunai menggunakan GO-PAY di Bus Rapid Transit (BRT) Trans-Semarang, pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi binaan Pemerintah Kota Semarang, penerapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara non-tunai di Kota Semarang, dan kolaborasi dengan pihak swasta lainnya di Kota Semarang dalam pembayaran non-tunai di Obyek Wisata Sam Poo Kong (Rahmalokita 2019). Selain itu, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Semarang juga menjalin kolaborasi dengan Grab untuk pengembangan Semarang *Smart City* dalam bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik yang diwujudkan dalam program "Co-creation for a Smarter City" (Rizqyana 2020).

Semarang *Smart City* pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 26

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas (Masterplan Semarang *Smart City*) dijelaskan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam kesuksesan pengembangan *smart city*. Masyarakat memiliki peran ganda yang sangat relevan. Pertama, mereka berperan sebagai pengguna akhir yang memanfaatkan solusi dan layanan *smart city* yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Dengan memanfaatkan teknologi cerdas, masyarakat dapat memperoleh akses layanan publik lebih mudah, cepat, dan efisien. Kedua, masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan, umpan balik, dan saran terhadap implementasi proyek-proyek *smart city*. Dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi, maka pengembangan *smart city* di Kota Semarang dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa komponen *Enabling supply & demand side policy* dalam mewujudkan *smart governance* di Kota Semarang sudah terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di Kota Semarang dalam mewujudkan konsep *Smart City*. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan *smart city* telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi *smart governance*.

2. *Transparency & open data*

Definisi *open data* menurut Open Knowledge Foundation adalah data yang dapat digunakan secara bebas, digunakan kembali, dan didistribusikan kembali oleh siapa saja. *Open data* dalam hubungannya dengan pemerintahan adalah sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang menyediakan menyediakan portal *open data* yaitu <https://data.semarangkota.go.id/>.



Gambar 4.

Tampilan Portal Satu Data Kota Semarang

data.semarangkota.go.id adalah sebuah website yang menyediakan data-data dari seluruh Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Semarang. Saat ini, terdapat 2.240 elemen data yang terdiri dari 61 OPD/Instansi dan dikategorikan menjadi 13 kategori. 13 kategori tersebut antara lain yaitu pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan budaya, sosial, demografi, ketenagakerjaan, ekonomi dan investasi, industri dan usaha mikro, lingkungan hidup, infrastruktur, tata ruang, dan yang terakhir adalah kebencanaan.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa komponen *Transparency & open data* dalam mewujudkan *smart governance* di Kota Semarang sudah terpenuhi. Dengan adanya akses terhadap *open data*, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, akademisi, dan pihak swasta untuk menggunakan data tersebut dalam berbagai kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memastikan bahwa data yang tersedia dalam portal *open data* selalu diperbarui secara berkala.

3. *ICT & E-Gov*

Kota Semarang merupakan sebuah wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh seorang Walikota. Seperti halnya pemerintahan daerah lainnya, struktur pemerintahan Kota Semarang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, total OPD Kota Semarang berjumlah 34 yang meliputi sekretariat daerah, dinas, badan, inspektorat, dll (Wibowo 2022).

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

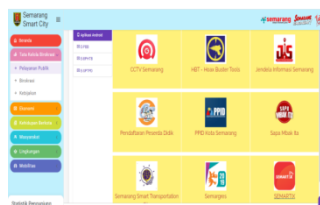
"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Semarang Kota Cerdas (Masterplan Semarang *Smart City*), penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Semarang telah menjadi pilar utama dalam upaya mewujudkan *smart governance*. Melalui implementasi *ICT & E-Gov*, pemerintah Kota Semarang menciptakan transformasi signifikan dalam cara berinteraksi dengan masyarakat, memberikan layanan, dan mengelola administrasi pemerintahan dengan meluncurkan berbagai aplikasi dan platform digital. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintah.



Gambar 5.
Tampilan website OPD Kota Semarang



Gambar 6.
Tampilan pelayanan publik (*Android*) Kota Semarang

Berdasarkan penelitian pada situs web Semarang *Smart City* yaitu <https://smartcity.semarangkota.go.id/>, diketahui bahwa dari total 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Semarang, terlihat bahwa semua telah menyediakan website layanan publik secara *online*. Dalam situs web juga terdapat aplikasi *online* seperti Jendela Informasi Semarang, Sapa Mbak Ita, e-Sarapan, Ambulance Hebat, Monev, SIDNOK, dan masih banyak lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

pelayanan publik. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa Pemerintah Kota Semarang menerapkan teknologi *metaverse* di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar tidak perlu datang ke MPP untuk mengurus perizinan.



Gambar 7.
Tampilan *Metaverse* Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang

Terdapat perbedaan signifikan antara pelayanan publik secara *online* dengan layanan publik konsep *metaverse*. Pelayanan publik secara *online* cenderung bersifat satu per satu, di mana pengguna harus mengakses layanan secara individual melalui *website* atau aplikasi tertentu. Sedangkan, pelayanan publik konsep *metaverse* menawarkan pendekatan yang lebih interaktif dan immersif. Dalam hal ini, masyarakat Kota Semarang dapat mengakses berbagai layanan publik dalam lingkungan virtual yang menyerupai dunia nyata, dengan representasi visual dalam bentuk 3D.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa komponen *ICT & E-Gov* dalam mewujudkan *smart governance* di Kota Semarang sudah terpenuhi. Pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah maju dalam menerapkan konsep *smart governance* dengan memanfaatkan komponen *ICT & E-Gov*. Hal ini terlihat dari adanya website layanan publik untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berbagai aplikasi *online*, dan penerapan teknologi *metaverse* di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan serta akses yang lebih baik bagi masyarakat Kota Semarang.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penerapan *smart governance* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang, dapat disimpulkan

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

bahwa komponen-komponen penting yang menjadi fokus analisis, yaitu *Enabling supply & demand side policy*, *Transparency & open data*, dan *ICT & E-Gov*, telah terpenuhi dengan baik. Ini menandakan bahwa penerapan *smart governance* di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik secara digital dengan memperhatikan pada kolaborasi dan integrasi data yang lebih baik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatannya, penting bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi dan monitoring serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan pelayanan yang responsif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan *smart governance* di Kota Semarang:

1. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan bahwa data yang tersedia dalam portal *open data* selalu diperbarui secara berkala agar dapat digunakan secara optimal dalam pengembangan *smart city* di Kota Semarang.
2. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan literasi digital masyarakat dan memberikan edukasi mengenai manfaat dan cara penerapan konsep *smart city*.
3. Pemerintah Kota Semarang dapat menjalin kolaborasi yang lebih luas lagi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam pengembangan *smart city* di Kota Semarang.
4. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan evaluasi terhadap layanan-layanan publik yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua sistem dan layanan yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Anindra, F., Supangkat, S. H., & Kosala, R. R. (2018). Smart Governance as Smart City Critical Success Factor (Case in 15 Cities in Indonesia). *Proceeding - 2018 International Conference on ICT for Smart Society: Innovation Toward Smart Society and Society 5.0, ICISS 2018*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/ICTSS.2018.8549923>
- Citiasia inc. (2016). SMART NATION: Mastering Nation's Advancement from SMART READINESS to SMART CITY. 2016, 1-16. www.citiasiainc.id
- Hasibuan, A., & Sulaiman, oris kianto. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127-135. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>
- Kozlowski, W., & Suwar, K. (2021). Smart City: Definitions, Dimensions, and Initiatives. *European Research Studies Journal*, XXIV(Special Issue 3), 509-520. <https://doi.org/10.35808/ersj/2442>
- Nugroho, A.A, & Fitri Azmi, I. (2021). Alleviating Society's Economic Crisis: Narrative Policy on Social Safety Nets Policy Process During Covid-19 Pandemic. *Policy & Governance Review*, 5(2), 113. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i2.443>
- Nugroho, A. A. (2018). Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Pengembangan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 30-36.
- Rahmalokita, G. (2019). Menuju Smart City, Pemkot Semarang Ajak Go-Jek Bangun Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Indiekraf.Com*. <https://indiekraf.com/menuju-smart-city-pemkot-semarang-ajak-go-jek-bangun-pelayanan-publik-berbasis-digital/>
- Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Ijd-Demos*, 3(2), 86-97. <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87>
- Rizqyana, A. (2020). Grab dan Pemerintah Kota Semarang Siap Kembangkan Semarang Smart City. *Tribunjateng.Com*. <https://tribunjatengtravel.tribunnews.com/2020/08/18/grab-dan-pemerintah-kota-semarang-siap-kembangkan-semarang-smart-city>
- Tri, E., Aindita, F., Setiawan, I., & Semarang, P. K. (2022). Penerapan Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 97-116.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2726/1366>

Wibowo, R. A. (2022). *Evaluasi Smart Governance Dalam Penerapan Smart City Di Kota Semarang*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN

AGUNG.

Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). STRATEGI IMPLEMENTASI SMART CITY KOTA BANDUNG. *Jurnal Good Governance*, 18(1).